

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Assa, P. G., Manossoh, H., & Mawikere, L. 2018. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode (2013-2017). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4): 730-733.
- Bahl, R. W., & Smoke, P. J. 2003. *Restructuring Local Government Finance in Developing Countries: Lessons from South Africa*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Bakhtiar, Khaerana, & Yunus, M. H. 2023. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. *JEMMA* 6(1): 52-61.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Edisi Pertama. Makassar.
- Hadi, S. S., & Saputri, R. D. 2018. Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPRD DKI Jakarta. *ejournal BSI*, 5(2): 185-194.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Handaka, R. D. 2017. *Buku 1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Hartati, Su'un, M., & Jumaid, A. 2019. Analisis Potensi, Kontribusi, dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Competitiveness*, 8(1): 240-249.
- Ipu, R. V., Karamoy, H., & Kindangen, W. D. 2022. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2): 827-836.
- Islami, D., & Rahmawati, L. 2020. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 4(2): 169-179.
- Maharani, C. S., & Isroah. 2019. Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 7(5): 1-11.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

- Niayah, & Danisya. 2022. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial dan sains*, 2(6): 731-736.
- Nurbayani, Teri, & As'ad, M. 2021. Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020. *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal*, 3(1): 43-59.
- Resmi, S. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rioni, Y. S. 2022. Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1): 396-401.
- Riyanto, S. H., & Andiani, L. 2021. Pengaruh Insentif Pajak PKB dan BBNKB terhadap PAD Jawa Timur di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(2): 183-187.
- Rizal, Y., & Hidayah, M. 2018. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 9(1): 84-91.
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2016. *Research Methods for Business*. Chicester: John Wilet & Sons.
- Soessanto, M. E. 2011. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, E., Indarti, & Fitri, I. 2022. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau 2015-2020. *Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 2(1): 238-245.
- Wahidah & Sorong, A. 2018. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. *JEMMA*, 1(1): 11-21.
- Bapenda Sulsel. Bapenda Sulsel Sosialisasikan dasar Pengenaan pajak Kendaraan. Diakses 15 Maret 2023, dari <https://bapendasulsel.web.id/v1/2022/12/15/bapenda-sulsel-sosialisasikan-dasar-pengenaan-pajak-kendaraan/>
- Direktorat Jenderal Pajak. Pajak. Diakses 1 Februari 2023, dari <https://www.pajak.go.id/id/pajak>

Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses 27 Maret 2023, dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. 2016. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021. 2021. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . 2022. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Biodata

### BIODATA

#### Identitاس Diri

Nama : Putri Noviyanti Khairunnisa  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 16 November 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Nusa Tamalanrea Indah blok GG/2  
Telepon Rumah dan Hp : 087757776200  
Alamat E-mail : [putrinoviyantikh@gmail.com](mailto:putrinoviyantikh@gmail.com)

#### Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
  - a. SDIT Al- Ashri (2007-2013)
  - b. SMP Negeri 12 Makassar (2013-2016)
  - c. MAN 2 Kota Makassar (2016-2019)
- Pendidikan Nonformal
  - a. Pelatihan *Basic Learning Skills, Character and Creativity* (2019)

#### Pengalaman

- Kerja
  - a. Magang Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Periode Oktober 2022
  - b. Program Magang Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Periode Desember 2022 – Januari 2023
  - c. Magang Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, Papua Periode Juli 2023

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, Juli 2023

Putri Noviyanti Khairunnisa

## Lampiran 2 Peta Teori

### PETA TEORI

No	Penulis/ Topik/ Judul Buku/ Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/ Artikel	Konsep/ Teori/ Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
1.	Bakhtiar dkk., 2023, Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Kota Palopo tahun 2018-2021.	Pajak daerah menjadi hak yang dimiliki daerah untuk melaksanakan kegiatan otonominya	Variabel: 1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor 2. Pendapatan Asli Daerah  Teknik analisis: deskriptif kuantitatif	Nilai kontribusi PKB terhadap PAD Kota Palopo tahun 2018-2021 sudah masuk katagori sedang dengan rata-rata sebesar 20,39%. Diperlukan usaha lebih giat lagi untuk mendorong masyarakatnya supaya patuh membayar pajak.
2.	Ipu dkk., 2022, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Talaud.	Kontribusi pendapatan asli daerah tahun berjalan diperlukan untuk menentukan APBD tahun berikutnya	Variabel: 1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor 2. Pendapatan Asli Daerah  Teknik analisis: deskriptif kualitatif	Kontribusi rata-rata PKB terhadap PAD pada Kabupaten Talaud tergolong kurang dengan rata-rata sebesar 10,58%. Pemerintah diharapkan memperketat sanksi dan sistem administrasi.

No	Penulis/ Topik/ Judul Buku/ Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/ Artikel	Konsep/ Teori/ Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
3.	Rizal & Hidayah, 2018, Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Samsat Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.	Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kontribusi PKB dan BBNKB di Samsat Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh	PKB dan BBNKB diduga memberi kontribusi yang relatif besar terhadap pendapatan asli daerah	Variabel: 1. Kontribusi PKB dan BBNKB 2. Pendapatan Asli Daerah Teknik analisis: deskriptif kuantitatif	Tingkat kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD Provinsi Aceh sejak 2012-2016 cenderung naik dari tahun ke tahun. Akan tetapi, masih dalam kategori kurang.
4.	Hadi & Saputri, 2018, Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada BPRD DKI Jakarta	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada BPRD DKI Jakarta	Peran pendapatan asli daerah sangat penting bagi pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah	Variabel: 1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor 2. Pendapatan Asli Daerah  Teknik analisis: deskriptif kualitatif	Capaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap tahunnya.
5.	Rioni, 2022, Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap	Untuk mengetahui kontribusi dan potensi pajak kendaraan bermotor terhadap	Paajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap belanja	Variabel: 1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor 2. Potensi pajak kendaraan bermotor	Kontribusi pajak kendaraan bermotor menunjukkan angka 20% sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah tergolong sedang sedangkan


No	Penulis/ Topik/ Judul Buku/ Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/ Artikel	Konsep/ Teori/ Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
	Pendapatan Asli Daerah	pendapatan asli daerah Kota Binjai	pemerintah dan pembangunan nasional.	3.Pendapatan Asli Daerah  Teknik analisis: Deskriptif kualitatif	derajat potensi pajak kendaraan bermotor menampakkan peningkatan yaitu 33,32% dan tergolong cukup baik.
6.	Niayah & Danisya, 2022, Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi PKB terhadap PAD	Pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pajak daerah yang berpotensi untuk meningkatkan PAD dalam beberapa tahun ke depan	Variabel: 1. Efektivitas pajak kendaraan bermotor 2. Kontribusi pajak kendaraan bermotor 3. Pendapatan Asli Daerah  Teknik analisis: deskriptif kuantitatif	Kontribusi dan efektivitas PKB di Jawa Tengah tahun 2017 hingga 2020 termasuk sangat efektif yaitu rata-ratanya sekitar 102,045%. Pemerintah berperan sangat aktif dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah.
7.	Maharani dan Isroah, 2021, Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya	Untuk mengetahui pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi tiga objek pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar terhadap pendapatan asli daerah	Kriteria elastisitas oleh Davey (1988) yang berkaitan dengan pertumbuhan potensi basis pajak dan kemudahan menarik manfaat dari pertumbuhan pajak yang terjadi	Variabel: 1. Pertumbuhan 2. Efektivitas 3. Kontribusi 4. Pendapatan Asli Daerah  Teknik analisis: deksriptif kuantitatif	Rata-rata pertumbuhan penerimaan PKB tahun 2010-2016 mengalami pertumbuhan positif sedangkan pertumbuhan BBNKB dan pajak bahan bakar mengalami pertumbuhan negatif. Efektivitas penerimaan ketiga objek pajak tergolong sangat efektif. Dan kontribusi PKB terhadap PAD mengalami peningkatan,



No	Penulis/ Topik/ Judul Buku/ Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/ Artikel	Konsep/ Teori/ Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
	terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016.				sedangkan kontribusi BBNKB dan pajak bahan bakar mengalami fluktuatif.
8.	Assa dkk., 2018, Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode (2013-2017).	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah	Pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan	Variabel: 1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor 2. Pendapatan Asli Daerah  Teknik analisis: deskriptif kualitatif	Setiap tahunnya dari 2013-2017, penerimaan PKB belum memenuhi target di mana berdampak pada kontribusinya terhadap PAD.
9.	Tambunan dkk., 2022, Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pendapatan Asli	Untuk mengetahui nilai efektivitas dan kontribusi PKB dan BBNKB dalam kurun waktu tahun 2015-2020	Pelayanan pemerintah selaras kepada masyarakat. Jika pengelolaan daerah sudah optimal, maka hak-hak yang diberikan kepada masyarakat juga optimal.	Variabel: 1. Efektivitas pajak kendaraan bermotor 2. Kontribusi pajak kendaraan bermotor 3. Pendapatan Asli Daerah  Teknik analisis: metode kuantitatif dengan rasio keuangan	Diperlukan upaya perbaikan pengelolaan PKB dan BBNKB di tahun berikutnya agar memberikan kontribusi yang lebih besar.

No	Penulis/ Topik/ Judul Buku/ Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/ Artikel	Konsep/ Teori/ Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/ Isi Buku
	Daerah Provinsi Riau 2015-2020.				
10.	Islami & Rahmawati (2020), Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur	Untuk mengetahui kontribusi PKB dan BBNKB terhadap pendapatan asli daerah Jawa Timur	Pajak daerah diperlukan untuk kepentingan otonomi daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat	Variabel: 1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor 2. Pendapatan Asli Daerah  Teknik Analisis: Deskriptif kualitatif	PKB dan BBNKB menjadi penyumbang terbesar pajak daerah dan berkontribusi terhadap PAD.
11.	Nurbayani dkk., 2021, Analisis Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020.	Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Pendapatan daerah menjadi sector penting untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan dan pembangunan daerah, salah satunya melalui pajak. Pajak dapat digunakan untuk membiayai <i>public saving</i> dan disalurkan menjadi <i>public investment</i>	Variabel: 1. Pertumbuhan 2. Efektivitas 3. Kontribusi 4. Pendapatan Asli Daerah  Teknik Analisis: Deskriptif kuantitatif	Pertumbuhan PKB mengalami fluktuatif karena hal ini berkaitan dengan daya beli konsumen. Tingkat efektivitas PKB tergolong sangat efektif karena mencapai target dan kontribusi PKB terhadap PAD mengalami peningkatan setiap tahun karena meningkatnya unit kendaraan bermotor sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

### Lampiran 3 Surat Izin Pengambilan Data Awal

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
JL. A.P. PETTARANI No.1 TLP 872 164 FAX 854 010  
MAKASSAR Kode Pos 90221

---

**NOTA DINAS**

DARI : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL  
KEPADA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PELAPORAN  
NOMOR : 070/1065 /Bapenda  
TANGGAL : 31 Maret 2023  
PERIHAL : IZIN PENGAMBILAN DATA

---

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13645/S.02/PTSP/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal izin Penelitian Mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini :

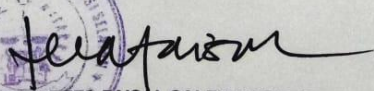
N a m a : PUTRI NOVIYANTI KHAIRUNNISA  
Nomor Pokok : A031191109  
Program Studi : Akuntansi  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : JL. P. Kemerdekaan Km.10 Makassar

Untuk selanjutnya dapat difasilitasi dalam melaksanakan penelitian / pengambilan data pada Bidang Perencanaan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah dengan judul **"ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2022"** dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan agar mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

*Yth. Ka Subkoordinator Pelaporan :*  
*- Tolong di bantu -*  
*- tks*  
*f s / 3-23*

**SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

  
**Dr. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19820306 200012 1 001

Scanned by TapScanner

**Lampiran 4 Foto Pertemuan dengan Bapak Irwan Setiawan, S.H., M.H. dalam rangka izin pengambilan data**





## Lampiran 5 Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. A.P. PETTARANI No.1 TLP 872 164 FAX 854 010  
MAKASSAR Kode Pos 90221

**NOTA DINAS**

DARI : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL  
KEPADA : KEPALA BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI  
NOMOR : 070/1804/Bapenda  
TANGGAL : 13 Juni 2023  
PERIHAL : Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 18969/S.01/PTSP/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal izin Penelitian Mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini :

N a m a : PUTRI NOVIYANTI KHAIRUNNISA  
Nomor Pokok : A031191109  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : JL. P. Kemerdekaan Km.10 Makassar

Untuk selanjutnya dapat difasilitasi dalam melaksanakan penelitian / pengambilan data pada Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah dengan judul "**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2022**" dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan agar mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

**SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Dr.H.REZA FAISAL SALEH,S.STP.,M.Si**

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19820306 200012 1 001

Scanned by TapScanner

**Lampiran 6 Foto Pertemuan dengan narasumber dalam Rangka Wawancara Penelitian**



## Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. A.P. Pettarani No.1 Tlp 872 164 Fax 854 010  
Makassar Kode Pos 90221



Makassar, 10 Agustus 2023

Nomor : 800/2436/Bapenda  
Lampiran : -  
Perihal : Penyelesaian Penelitian

Kepada,  
Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin Makassar  
Di  
Makassar

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 18969/S/01/PTSP/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal izin penelitian , atas nama :

Nama : PUTRI NOVIYANTI KHAIRUNNISA  
NIM : A031191109  
Program Studi : Akuntansi

Bersama ini disampaikan bahwa Saudara tersebut diatas, telah selesai Melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan dari tanggal 12 Juni s/d 11 Agustus 2023 dengan judul "**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**".

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

SEKRETARIS  
  
Di: **H. REZA FAISAL SALEH, S.STP., M.Si**  
Pangkat / Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 48820306 200012 1 001

## Lampiran 8 Transkrip Wawancara

### Transkrip Wawancara

Waktu Wawancara : 16 Juni 2023

Lokasi Wawancara : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Teknologi dan Sistem Informasi (Jalan AP. Pettarani No. 1 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan)

#### Profil Narasumber

Nama : Andi Satriady Sakka, S.STP., M.M.

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi

Waktu Pelaksanaan : 14.00 – 14.45

#### Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Pajak Kendaraan Bermotor menjadi komponen yang penting dalam menunjang penerimaan PAD?	Betul, pajak kendaraan bermotor yang lebih dikenal dengan pkb merupakan komponen yg paling besar memberikan pengaruh atau menyumbang realisasi penerimaan dari keseluruhan target pad di provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kurang lebih sekitar 60% dari struktur pad itu 60% dari pkb
2.	Mengapa penetapan target penerimaan pkb mengalami naik turun setiap tahun?	Penetapan target penerimaan pkb mengalami naik turun setiap tahun itu tentunya dipengaruhi beberapa indicator, salah satunya itu karena pada saat covid melanda di Indonesia. Di Sulawesi selatan target penerimaan pkb itu mengalami penurunan yang signifikan dari target



No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>sebelumnya karena mengingat kondisi covid-19 yang sempat atau sangat tinggi di daerah Indonesia khususnya di susel jadi membatasi pergerakan perekonomian dan pergerakan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, salah satunya itu untuk membayar pajak. Sehingga targetnya itu mengalami naik turun. Tapi, setelah pandemic covid target pkb itu naik kembali untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada saat sekarang ini.</p>
3.	<p>Berdasarkan data yang diperoleh terdapat kenaikan dan penurunan penerimaan PKB yang ditinjau dari berbagai rasio, baik itu efektivitas, kontribusi dan pertumbuhannya. Tolong jelaskan apa saja penyebab naik turunnya penerimaan PKB.</p>	<p>Itu tadi salah satunya penyebab naik turunnya target pkb dipengaruhi beberapa indikator, salah satunya mungkin tadi karena adanya covid, trus mengikuti juga inflasi atau kenaikan harga-harga atau tingkat pertumbuhan perekonomian di Sulawesi selatan terus juga berpengaruh terhadap berbagai regulasi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya dalam penerapan rasio atau nilai jual kendaraan yang berlaku di daerah Sulawesi selatan.</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
4.	Seperti apa bentuk kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan PKB?	Jadi bapenda Sulawesi selatan jadi sector dalam peningkatan penerimaan pkb telah melakukan berbagai macam hal atau berbagai macam tindakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan penerimaan pkb di Sulawesi selatan, salah satunya itu pembayaran melalui secara non-tunai bekerja sama dengan pnm pm chanel. Kedua, kegiatan penertiban atau Razia kendaraan yang menunggak pajak bersama pihak kepolisian daerah dan jasa raharja. Tiga, itu menambah akses pelayanan untuk pendekatan pelayanan ke masyarakat khususnya di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau, baik itu melalui samsat keliling, samsat mobile eee pembukaan gerai-gerai samsat atau kedai samsat di tiap kecamatan dan kelurahan atau desa yang ada di wilayah Sulawesi selatan. Dan empat, tentunya itu layanan jemput dari petugas samsat ke wajib-wajib pajak yang membutuhkan.
5.	Apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pkb? (khususnya pada bidang teknologi dan sistem informasi)	Jadi upaya yang tentu dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pkb khususnya di bidang teknologi atau digitalisasi yaitu peluncuran aplikasi bapenda sulsel mobile yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak dimanapun dan

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p> kapanpun. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor samsat, cukup mengisntal atau mengakses aplikasi bapenda sulse mobile yang telah ada di playstore dan Appstore, wajib pajak tersebut sudah dapat membayar ee kewajibannya atau pajak kendaraan bermotornya dimanapun dia berada. Salah satunya itu, terus dua, yaitu membuka akses pelayanan secara non-tunai seperti penyediaan barcode qris di seluruh layanan samsat yang ada di Sulawesi selatan dan juga meningkatkan penerimaan pkb dari sector non-tunai atau sector secara digital.</p>
6.	Apakah ada hambatan yang muncul dalam penerimaan PKB?	<p>Hambatan yang muncul dalam penerimaan pkb tentunya ada, salah satunya itu mungkin kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya secara tepat waktu yang masih kurang, terus kedua adanya kecenderungan masyarakat yang mungkin dalam hal ini belum terlalu patuh atau belum terlalu mengetahui terkait pentingnya kepemilikan kendaraan bermotor sesuai dengan identitasnya. Terus ketiga itu hambatannya banyaknya kendaraan yang telah berpindah tangan atau berpindah kepemilikan yang belum dilaporkan ke kantor samsat atau samsat sehingga menyulitkan</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>petugas dalam melakukan inetsifikasi dan ekstensifikasi pajak. Terus yang keempat yaitu beberapa wilayah di sulsel masih ada daerah blind spot atau tidak terjangkau jaringan sehingga menyulitkan bagi masyarakat ataupun bagi petugas untuk melakukan pelayanan penerimaan pkb di daerah tersebut.</p>
7.	<p>Apakah ada solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan tersebut?</p>	<p>Solusi yang diberikan untuk mengatasi hambatan yaitu yang tadi bagaimana kita kita telah menyiapkan khusus bapenda sulsel itu menyiapkan beberapa, berbagai akses pelayanan terutama di sistem teknologi informasi yaitu adanya pembayaran pajak yang cukup dilakukan di rumah saja sehingga tidak perlu lagi mengurus tenaga dan mengurus biaya bagi wajib pajak untuk membayar di kantor samsat. Terus yang kedua yaitu tadi menambah jumlah-jumlah atau tapping point atau tempat pembayaran yang ada di seluruh wilayah sulsel mulai dari tingkat kecamatan, desa dan kelurahan yang ada di 24 kabupaten/kota di wilayah sulsel. Trus yang ketiga yaitu tentunya kerja sama yang aktif atau sinergitas antar pemerintah provinsi dan pemerintah daerah khususnya dalam peningkatan atau optimalisasi</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>pelayanan penerimaan pkb melalui sistem pendataan atau door to door di wajib pajak yang melakukan atau menunggak biaya pajak kendaraannya.</p>
8.	<p>Apakah dengan teknologi dan sistem informasi yang dimiliki bapenda ini dapat dikatakan sudah memadai/efektif dan berkontribusi dalam penerimaan pkb?</p>	<p>Iya, tentunya dengan adanya sistem digitalisasi pembayaran pkb itu sangat berpengaruh dan efektif dalam meningkatkan penerimaan pkb di wilayah sulsel. Karena ini dbuktikan dengan data yang ada bahwa ada pertumbuhan penerimaan pkb dari tahun ke tahun khususnya di sistem pembayaran secara non-tunai atau yang melalui digitalisasi. Jadi, dengan adanya sistem informasi ini, masyarakat semakin mudah dan semakin patuh dalam membayar kewajibannya yaitu membayar pajak kendaraan bermotornya.</p>
9.	<p>Bagaiman peran bidang teknologi dan sistem informasi dalam mengelola penerimaan PKB?</p>	<p>Jadi, bidang teknologi dan sistem informasi itu salah satunya mempunyai tugas yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan pkb, khususnya di sector yang berkaitan dengan teknologi dan sistem informasi, mengembangkan aplikasi dan meningkatkan infrastruktur jaringan. Jadi dengan adanya bidang teknologi dan sistem informasi, semua data pembayaran pkb yang ada di seluruh 25 upt samsat kabupaten/kota di sulsel itu dapat</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>termonitoring dan tersistem dengan baik melalui digitalisasi atau peran dari bidang teknologi dan sistem informasi. Dan juga di bidang teknologi dan sistem informasi ini senantiasa mengembangkan berbagai macam aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayarannya, khususnya di sector pembayaran non-tunai.</p>
10.	<p>Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Pelaporan dan Pendapatan Bapenda Sulsel, data menunjukkan penerimaan PAD selama 5 tahun terakhir belum mencapai angka 100%. Apakah PKB memiliki potensi untuk berkontribusi pada penerimaan PAD tersebut?</p>	<p>Jadi, selama 5 tahun dari keseluruhan sector PAD terdiri dari 5 objek pajak yaitu pkb, bbnkb, pap, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan paajak rokok memang belum mencapai 100% secara keseluruhan dari 5 objek pajak tersebut. Hal ini disebabkan karena berbagai pengaruh yang dipengaruhi, baik secara internal maupun secara eksternal. Terus terkait pkb, seperti yang tadi telah saya sebutkan bahwa pkb itu merupakan potensi terbesar atau memberikan sumbangsih terbesar dari keseluruhan pad Sulawesi selatan karena memiliki menyumbang kurang lebih 60% dari keseluruhan target pad yang ada di Sulawesi selatan</p>
11.	<p>Hal apa saja yang menyebabkan penerimaan pad belum mencapai</p>	<p>Jadi hal-hal yang menyebabkan pad belum mencapai secara keseluruhan yaitu yang terdiri dari 5 objek pajak</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
	angka 100% selama 5 tahun terakhir?	belum mencapai angka 100% itu karena salah satunya dipengaruhi tadi adanya covid-19 yang ini mungkin melanda seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Terus pertumbuhan perekonomian masyarakat yang belum merata di keseluruhan sector, terus ketiga adanya kebijakan atau regulasi dari pemerintah pusat yang menyebabkan penerimaan pad khususnya itu pajak rokok itu mengalami penurunan
12.	Berdasarkan perhitungan rasio yang telah saya lakukan, apakah bapak dapat menjelaskan kondisi penerimaan pkb ditinjau dari efektivitas, kontribusi, dan pertumbuhan?	Jadi kondisi penerimaan pkb dari segi efektivitas, kontribusi, dan pertumbuhannya itu khususnya di wilayah Sulawesi selatan, penerimaan pkb di Sulawesi selatan telah berjalan secara efektif dan efisien. Kenapa? Karena hal ini dipengaruhi dengan telah adanya aplikasi atau sistem informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disiapkan oleh pemerintah provinsi sulsel kepada wajib pajak sehingga dengan pemanfaatan teknologi ini, wajib pajak semakin dimudahkan dalam hal melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya karena mereka tidak perlu lagi datang ketemu ke kantor samsat, cukup dengan aplikasi dan bias membayar dimanapun dan kapanpun di wilayah

No.	Pertanyaan	Jawaban
		<p>Sulawesi selatan atau bahkan di luar wilayah Sulawesi selatan. Terus kontribusi pkb bagi pad ini sangat besar ya, karena menyumbang kurang lebih 60% dari keseluruhan target penerimaan pad yang ada di wilayah Sulawesi selatan. Pertumbuhan pkb ini atau pertumbuhan pad ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan bahkan peningkatannya di atas hampir di atas 6% tiap tahunnya pertumbuhan pkb ini.</p>